

**PERAN PEMBINA DATA DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA
(Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD NOFLI AZIZ

NPM 2016041028



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

PERAN PEMBINA DATA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran)

Oleh

Muhammad Nofli Aziz

Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia di daerah merupakan wujud upaya perbaikan tata kelola data pada tingkat daerah. Terlebih lagi di Kabupaten Pesawaran, di mana masih sering ditemukan proses tata kelola data yang belum optimal. Hal ini terlihat dari data-data pemerintah yang belum dilengkapi dengan metadata sehingga sulit untuk diidentifikasi, basis data yang lemah dan rendahnya validitas data yang menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia, BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data memainkan peranan penting dalam terselenggaranya kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam pelaksanaan Kebijakan SDI di Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan didukung oleh data wawancara yang diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menumkan bahwa BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data telah melakukan tugas sebagaimana telah tertera dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Dalam aspek pemberian rekomendasi belum berjalan secara maksimal karena pemahaman dan kesadaran yang minim dari OPD. Pada aspek Pembinaan Statistik Sektoral sudah dilakukan secara rutin namun perwakilan OPD yang terus berubah-ubah membuat kegiatan pembinaan tidak berjalan dengan maksimal. Pada aspek pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah berjalan meski menemui beberapa kendala. Terakhir pada aspek pengecekan dan pengumpulan metadata telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Pesawaran meski dalam praktiknya masih harus menghandel tugas walidata.

Kata kunci : *Satu Data Indonesia, Pembina Data, OPD*

ABSTRACT

THE ROLE OF DATA COACH IN THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN ONE DATA POLICY

(Study at the Central Statistics Agency of Pesawaran Regency)

By

Muhammad Nofli Aziz

Implementation of Indonesia's One Data Policy in the regions is a form of effort to improve data governance at the regional level. Moreover, in Pesawaran Regency, where data management processes are often found to be not yet optimal. This can be seen from government data that is not yet equipped with metadata so it is difficult to identify, weak databases and low data validity which causes errors in decision making. In implementing the One Data Indonesia Policy, BPS Pesawaran Regency as data supervisor plays an important role in the implementation of this policy. This research aims to provide an overview of the role of BPS Pesawaran Regency as a data supervisor in implementing the SDI Policy in Pesawaran Regency. The method used in this research is a qualitative method supported by interview data obtained from informants. The data collection technique in this research is to use primary and secondary data. The data analysis techniques used are data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results of the research indicate that BPS Pesawaran Regency as the data supervisor has carried out the tasks as stated in Presidential Decree Number 39 of 2019. In the aspect of providing recommendations, it has not run optimally due to minimal understanding and awareness from the OPD. In the aspect of Sectoral Statistics Development, it has been carried out routinely, however, the OPD representation continues to change, meaning that the development activities do not run optimally. In the implementation aspect, the Evaluation of the Implementation of Sectoral Statistics has been running despite encountering several obstacles. Finally, the aspect of checking and collecting metadata has been carried out by BPS Pesawaran Regency, although in practice it still has to handle the duties of the data guardian.

Keywords : Satu Data Indonesia, Data Supervisor, OPD

**PERAN PEMBINA DATA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA**

(Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran)

Oleh:

MUHAMMAD NOFLI AZIZ

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA
ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammd Nofli Aziz, lahir di Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 27 November 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Sunaryo dan Ibu Henny Herlina. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 7 Gadingrejo diselesaikan tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 1 Gadingrejo diselesaikan tahun 2017, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu, penulis juga turut serta dalam kegiatan magang MBKM dengan melaksanakan kegiatan magang di BPS Kabupaten Pesawaran.

MOTO

*“"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya
Allah bersama kita."*

(QS. At-Taubah: 40)

*“Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau
akan jadi orang yang tahu..”*

(Al-Ghazali)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan berkah berupa kasih sayang serta nikmat akal pikiran kepadaku, Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ibu dan Bapakku tercinta

Adikku tersayang

Terima kasih untuk semua bentuk dukungan yang sudah kalian berikan berupa kasih sayang dan segala doa untukku.

Seluruh keluarga, sanak saudara yang mendoakan dan mendukungku hingga mampu menyelesaikan studiku.

Teman – teman terbaikku dan seperjuanganku yang banyak membantuku.

Para pendidik dan Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT pencipta alam semesta yang telah memberikan kebesarannya kepada penulis melalui kemudahan dan pertolongan yang tidak pernah terduga sebelumnya, serta karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **PERAN PEMBINA DATA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran)** Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri, namun banyak pihak yang memberikan bimbingan, motivasi, inspirasi, serta dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas segala bantuan yang diterima, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Ibu Henny Herlina dan Bapak Sunaryo, berkat dukungan dan doa kalianlah aku bisa sampai sejauh ini. Terima kasih ibu dan bapak atas dukungan serta dorongan untuk terus melakukan yang terbaik. Doakan Aziz semoga kelak dapat membahagiakanmu hingga ke jannah-Nya.
2. Kepada Adikku tersayang, Nadhira Ayudia yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya selama ini.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi. Terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan, dukungan, nasihat dan arahannya selama ini kepada penulis.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan ,S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing utama penulis. Terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan, dukungan, nasihat dan arahannya selama proses pendidikan hingga penyusunan skripsi.
5. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih banyak Pak atas ilmu, bimbingan, arahan,

nasihat, dan dukungannya yang sudah diberikan kepada penulis selama proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N, M.P.A selaku dosen penguji yang telah membantu perbaikan melalui kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak Pak atas bimbingan dan arahnya kepada penulis demi perbaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung lainnya. Terima kasih banyak untuk semua ilmunya yang sudah diajarkan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Staff FISIP Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan.
9. Kepada desdekedes skuad, Irshal, Intan dan Dina yang telah menjadi teman dan penyemangat di saat-saat suka maupun duka, terimakasih karena telah selalu membersamaku dan menjadi teman-teman terbaikku.
10. Kepada kawan-kawan Bijikers Yahya, Hendra, Fachri, Kurnia dan Panjol yang selalu menghibur tatkala duka menghampiri dan menjadi teman-teman terbaik di saat apapun aku ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kalian.
11. Terimakasih kepada Halwa Anjumi Tanawar yang telah mencurahkan hati, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis menyusun skripsi ini. Terimakasih juga karena telah senantiasa menemani dalam suka dan duka.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman ADAMANTIA 2020. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
13. Kepada seluruh narasumber penelitian yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian. Sekaligus menjadi informan peneliti dan membuka wawasan peneliti tentang strategi dalam mengelola sampah di kawasan pesisir.

Akhir kata semoga kita semua mendapat limpahan rahmat serta hidayah dari ALLAH SWT, dan mudah-mudahan semua yang turut membantu

dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapat balasan dari ALLAH SWT. Aamiin... Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 30 Juli 2024

Penulis,

Muhammad Nofli Aziz

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kebijakan Publik.....	12
2.3 Implementasi Kebijakan.....	15
2.4 E-government.....	18
2.5 Kerangka Pemikiran.....	19
III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	22
3.2 Fokus Penelitian.....	22
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	23
3.4 Informan Penelitian.....	23
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Instrumen Penelitian	26
3.8 Analisis Data	26
3.9 Teknik Keabsahan Data	28

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Gambaran Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran.....	30
4.2. Gambaran Umum Kebijakan Satu Data Indonesia	34
4.3. Gambaran Pelaksanaan Kebijakan SDI di Kabupaten Pesawaran.....	40
4.4. Hasil Penelitian	42
4.3.1. Peran Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran sebagai Pembina Data dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia	43
4.3.2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai Pembina Data dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Data	90
4.5. Pembahasan	99
4.4.1 Peran Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran sebagai Pembina Data dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia	99
4.4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai Pembina Data dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Data.....	120
V. PENUTUP	127
5.1 Kesimpulan	127
5.2 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Predikat Nilai Tingkat Kematangan.....	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. Instansi yang sudah mengajukan dan mendapatkan Romantik (2023-2024).....	57
Tabel 4. Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Pesawaran	70
Tabel 5. Hierarki Domain, Aspek, dan Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.....	75
Tabel 6. Nilai IPS Kabupaten Pesawaran.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Institusi yang Terlibat dalam Penyelenggaraan SDI	5
Gambar 2. Bagan BPS Kabupaten Pesawaran	34
Gambar 3. Perbandingan masalah dan solusi yang ditawarkan dalam SDI.....	35
Gambar 4. Portal Satu Data Indonesia	36
Gambar 5. Penyelenggara SDI.....	38
Gambar 6. Alur penyelenggaraan SDI	39
Gambar 7. Portal Satu Data Pesawaran.....	45
Gambar 8. Dokumen FS 3.....	53
Gambar 9. Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.....	64
Gambar 10. Rapat Koordinasi persiapan EPSS 2024.....	79
Gambar 11. Metadata Kegiatan Statistik Sektoral	81

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan data pada dasarnya merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Baik dari pusat hingga daerah, kegiatan pembangunan memerlukan acuan data yang bersifat akurat, transparan dan *real time* untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 rencana pembangunan yang akan dilaksanakan harus disusun berdasarkan data-data. Data yang sudah terolah digunakan untuk mendapatkan pandangan mengenai suatu fakta dinamika informasi. Dengan demikian penggunaan data dan informasi telah menjadi semacam kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Kendati demikian, di Indonesia saat ini masih ditemukan banyak permasalahan dalam hal tata kelola data. Masih banyak permasalahan yang muncul mengenai pengelolaan data seperti, data tidak representatif, memiliki banyak versi, *out of date*, tidak mudah dicari, sulit dibagipakaikan, ego sektoral yang menyebabkan tidak sinkronnya data yang dihasilkan oleh setiap lembaga pemerintah (Mawanda, 2020). Selain itu beragam permasalahan tersebut juga dipreparah dengan minimnya SDM penyelenggara tata kelola data yang memahami data secara substansial dan mengerti mengenai teknis ilmu tentang data khususnya pada instansi daerah (Bayu dalam Islami, 2021).

Dalam ranah pemerintahan daerah, validitas data bahkan lebih bisa dipertanyakan lagi kebenarannya. Pengelolaan data patutnya dijalankan menurut mekanisme yang bisa dipertanggung jawabkan. Namun ketersediaan data di tingkat daerah yang lingkupnya lebih kecil seperti kecamatan terkesan agak sedikit dipaksakan. Pasalnya menurut Katan (2022) para aparatur pemerintah khususnya pada tingkat kecamatan yang terbatas dari sisi jumlah

sudah dibebankan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, harus dibebankan lagi dengan urusan pengelolaan data yang rumit. Karena itu data pada tingkat ini tidak lagi dikumpulkan dari hasil wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip), akan tetapi mengandalkan laporan singkat dari aparat di bawah, yakni dari kantor kelurahan atau kantor desa yang kejelasannya juga patut dipertanyakan. Sehingga pengumpulan data hanya menjadi semacam formalitas dalam memenuhi kewajiban mengumpulkan data. Padahal untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang baik, diperlukan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara legal dan valid.

Sebagai respon dari banyaknya masalah tata kelola data di tanah air, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 melahirkan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai tanggapan atas banyaknya masalah data yang masih terjadi di Indonesia. SDI adalah kebijakan pengelolaan data pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa data bersifat terkini, akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagikan antara lembaga pemerintah pusat dan daerah secara keseluruhan dengan mengikuti standar penggunaan data, interoperabilitas, metadata, dan penggunaan kode referensi dan data master. Satu Data Indonesia diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengelola data.

Kebijakan SDI, dibuat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan tata kelola data pemerintahan. SDI tidak bertujuan untuk menghapus atau mengganti kebijakan lain, sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat prosedur manajemen data pemerintah. Diciptakannya Portal SDI juga merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan disebarluaskan dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa data yang dihasilkan memenuhi empat prinsip satu data: satu standar data, satu metadata baku, interoperabilitas data, dan referensi data.

Dalam pelaksanaan Kebijakan SDI, terdapat tiga peran strategis yang di sematkan pada beberapa instansi baik pada tingkat pusat maupun daerah yakni pembina data walidata dan produsen data. Pembina data merupakan instansi pada tingkat pusat maupun daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait dengan data. Pembina data sendiri ditunjuk oleh Presiden dan disahkan melalui Perpres SDI. Instansi yang diberi tugas sebagai pembina data statistik adalah Badan Pusat Statistik, pembina data geospasial adalah Badan Informasi Geospasial, sedangkan pembina data keuangan negara adalah Kementerian Keuangan.

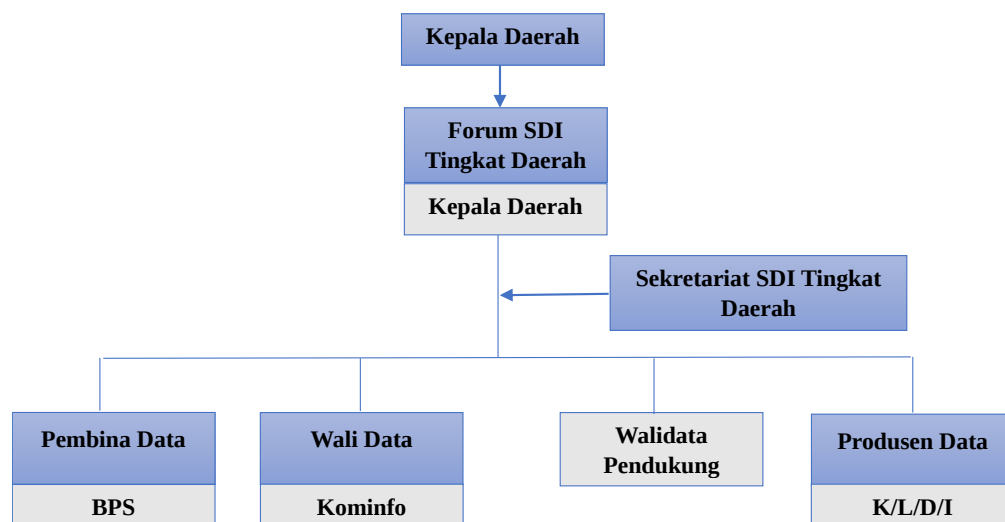
Instansi yang ditugaskan sebagai walidata merupakan unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta melakukan kegiatan penyebarluasan Data. Walidata tingkat pusat maupun daerah dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, ataupun Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan produsen data adalah unit pada Instansi pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen Data dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, ataupun Peraturan Kepala Daerah (Bappenas, 2021).

Pembina data menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan SDI baik di pusat atau di daerah. Sebagai pembina data, BPS mempunyai peran besar dalam memberikan masukan untuk dapat menyatukan data-data yang ada, dalam artian data-data tersebut harus mempunyai standard data yang sama, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas dan data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Sejalan dengan hal ini, menurut Bappenas (2021) Pembina data berperan dalam menerapkan data *leadership* dan data *quality assurance* pada instansi pemerintah penyelenggara data.

Sebagai pembina data statistik, BPS mempunyai tugas antara lain, untuk menetapkan standarisasi data lintas instansi pusat dan daerah, menetapkan

struktur dan format yang baku pada metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan daerah, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh K/L/D/I, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas (Perpres SDI pasal 13 ayat 1), dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada tingkat daerah menurut Perpres SDI Pasal 20 ayat 1 pembina data tingkat daerah ditugaskan untuk lebih terfokus untuk memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pembinaan oleh BPS menjadi suatu hal yang penting untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan oleh pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diamanatkan dalam Perpres SDI sehingga data yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.



Gambar 1. Institusi yang Terlibat dalam Penyelenggaraan SDI

Sumber : Perpres SDI No. 39 Tahun 2019

Peran sebagai pembina data juga diemban oleh BPS Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu *stakeholder* Kebijakan SDI di daerah. Peran pembina data cukup krusial sebab permasalahan terkait tata kelola data yang masih sering terjadi di Kabupaten Pesawaran. Hal ini tercermin dari nilai indeks kematangan statistik sektoral yang mana merupakan statistik yang penggunaannya ditujukan untuk pemenuhan tugas instansi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pesawaran terbilang masih sangat rendah. Pada tahun 2022 nilai Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Pesawaran berada pada angka 1,27 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Pesawaran menyentuh angka 1,47. Namun peningkatan yang ada dinilai belum cukup matang untuk penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas dan berpedoman pada prinsip-prinsip SDI. Berdasarkan keterangan nilai indeks dan predikat yang tertera pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik, nilai yang didapat oleh Kabupaten Pesawaran masih jauh dari kata memuaskan.

Tabel 1. Predikat Nilai Tingkat Kematangan

Nilai Indeks	Predikat
4,2 – 5,0	MEMUASKAN
3,5 - < 4,2	SANGAT BAIK
2,6 - < 3,5	BAIK
1,8 - < 2,6	CUKUP
< 1,8	KURANG

Sumber: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022

Dalam konteks pembina data, di Kabupaten Pesawaran sendiri BPS selain membina juga masih mengemban tugas sebagai pengumpul dan pengentri metadata khususnya dalam portal Satu Data Pesawaran. Namun permasalahan mengenai kelengkapan prinsip satu data pada data-data pemerintah di Kabupaten Pesawaran masih dipertanyakan. Dilansir dari website Bappeda Provinsi

Lampung Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Zainal Abidin menyatakan bahwa pengelolaan data pembangunan di tingkat Kabupaten termasuk Kabupaten Pesawaran masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari data-data pembangunan (data statistik sektoral) yang dihasilkan yang masih belum memenuhi standar dan metadata sebagaimana menjadi prinsip dalam kebijakan Satu Data Indonesia (bappeda.lampungprov.go.id, 2022).

Selain itu, di Pesawaran masih sering ditemukan basis data yang lemah dan pengelolaan manajemen data pada beberapa sektor yang dinilai kurang maksimal. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesawaran 2022 keberadaan data dan informasi terkait infrastruktur publik dan penataan ruang di Kabupaten Pesawaran masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan pembangunan memerlukan basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu kebijakan. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi pengelolaan manajemen data sektor infrastruktur publik dan penataan ruang sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain data infrastruktur, manajemen data pendidikan juga masih perlu dioptimalkan guna menghasilkan data dan informasi pendidikan yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan (sakip.pesawarankab.go.id, 2022).

Meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan di sisi lain juga membuat kegiatan survei sektoral semakin meningkat. Dalam kegiatan survei sektoral dan survei yang bersifat *ad hoc* seringkali terdapat beberapa kegiatan yang diselenggarakan dalam waktu yang amat berdekatan dan tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik profesional yang tersedia di pemerintahan. Keterbatasan jumlah SDM statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan dan membuat beberapa kegiatan pembinaan data oleh BPS Kabupaten Pesawaran berjalan kurang maksimal (Renstra BPS Kabupaten Pesawaran, 2020). Melalui prariset yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa kegiatan pembinaan data BPS Kabupaten Pesawaran melalui Romantik (Rekomendasi Kegiatan Statistik) yang merupakan

salah satu aplikasi layanan BPS yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memberitahukan rancangan kegiatan statistik ke BPS dan memperoleh rekomendasi dari BPS harus mundur beberapa bulan karena adanya kegiatan sensus lain seperti Sensus UMKM 2023.

Berdasarkan beragam permasalahan yang telah dipaparkan di atas penulis mencoba menganalisis peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai instansi yang ditunjuk sebagai pembina data statistik dalam kebijakan SDI untuk melihat sejauh mana kebijakan ini sudah benar-benar dijalankan. Judul yang penulis angkat adalah **“Peran Pembina Data dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (Studi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan satu data di BPS Kabupaten Pesawaran dalam kapasitas sebagai pembina data dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan satu data di BPS Kabupaten Pesawaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, masalah penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam rangka implementasi kebijakan satu data? dan
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam rangka implementasi kebijakan satu data?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam rangka implementasi kebijakan satu data? serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam rangka implementasi kebijakan satu data.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pelaksanaan Kebijakan Satu Data di Indonesia yang terbilang masih minim karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang relatif baru.

Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyumbangkan pemikiran berkenaan dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Kebijakan Satu Data serta memberikan masukan bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Kebijakan Satu Data.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggali beragam sumber penelitian terdahulu sebagai referensi bacaan dalam melihat hal apa saja yang telah diteliti yang berkaitan dengan fokus dan hasil penelitian guna menemukan unsur kebaruan, memperkaya teori dan menemukan urgensi dari penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama dan tahun penelitian	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Limitasi Penelitian
Islami (2021)	Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan <i>Critical Success Factors</i> (CSFs)	Setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia. Setiap bagian dari penyelenggaraan SDI (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data) memiliki sejumlah masalah dan tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti mengemukakan beberapa elemen penting yang dapat membantu SDI berhasil. Faktor-faktor ini diambil dari berbagai literatur.	Studi ini dilakukan secara konseptual dan tidak dilakukan secara empiris oleh karenanya diperlukan studi empiris untuk menguji setiap penemuan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif. Studi mengenai pengukuran value dari pengguna data terbuka juga belum dilakukan dan menjadi batasan dalam penelitian ini.
Prasetya dkk., (2022)	Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Studi	Hasil studi menunjukkan bahwa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman paling utama dalam implementasi SDI diantaranya adalah: kekuatan yaitu faktor regulasi dan teknologi;	Penelitian ini sangat bersifat kualitatif. Faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penyelenggaraan SDI di tingkat Kabupaten Ciamis belum

	Kasu Kabupaten Ciamis)	kelemahan yaitu faktor sumber daya manusia, peraturan pelaksana, pendanaan, ego sektoral; peluang yaitu faktor kebutuhan terhadap data berkualitas, sedangkan ancaman yaitu faktor perubahan regulasi, dan keamanan siber.	diberikan bobot. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan faktor-faktor tersebut diberi bobot dan dianalisis secara kuantitatif.
Febriansyah (2022)	Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)	Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung kebijakan SDI di Sumatera Selatan adalah kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi, sumber daya informasi dan wewenang yang sudah tersedia serta disposisi dalam bentuk arahan, kognisi, tanggapan dan adanya intensif, sedangkan faktor penghambat dalam kebijakan ini adalah transmisi komunikasi yang belum berjalan secara optimal, SDM yang masih kurang kompeten, fasilitas penunjang yang kurang modern, tidak adanya SOP yang memudahkan dalam menjalankan pekerjaan dan koordinasi kerja yang belum efektif.	Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan dan berfokus pada Instansi Diskominfo. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang diciptakan oleh George C. Edward III dengan empat indikator utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi.
Susniawati & Zamili (2022)	<i>Acceleration of One Indonesian Data through Collaborative Governance in Indonesia</i>	Hasil penelitian menemukan (1) Tantangan dalam menyelesaikan permasalahan substantif dengan mengidentifikasi permasalahan perbedaan data dari institusi pemerintah. Permasalahannya adalah masing-masing institusi mendefinisikan permasalahan dari sudut pandangnya masing-masing. Sehingga permasalahan tersebut akan semakin sulit untuk didefinisikan karena perbedaan cara pandang para pihak yang berkolaborasi dalam suatu permasalahan (2) Tantangan dalam proses kolaborasi, permasalahan open data, validitas data,	Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang terkesan terlalu luas dan kurang dipersempit sehingga data yang diperoleh pun tidak terspesifikasi dan masih bersifat general.

		dan data tunggal dihadapkan pada banyak permasalahan, salah satunya dimana terdapat 24.400 ribu aplikasi yang berdiri sendiri sehingga integrasi menjadi sulit. Ada ego sektoral dimana lembaga atau lembaga tidak bersedia membagikan datanya. (3) Tantangan akuntabilitas multirelasional dalam pelaksanaan percepatan SDI di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Masih banyak daerah yang belum menjalankan amanat Perpres tentang SDI karena berbagai alasan	
Suryahadi (2023)	Satu data Indonesia (<i>one Indonesian data</i>) to actualize public information disclosure and efficacious process management in the Mojokerto city government	Implementasi SDI khususnya di Mojokerto masih menghadapi banyak tantangan. Setiap komponen implementasi SDI (perencanaan data, pengumpulan data, pengecekan data, dan pendistribusian data) mempunyai beberapa permasalahan yang perlu segera dibenahi.	Analisis konseptual yang masih digunakan menjadi batasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, studi aktual harus dilakukan guna memverifikasi temuan yang telah dihasilkan dalam studi ini.
Amelia & Rahayu (2023)	<i>Analysis of Satu Data Indonesia Policy Implementation: The Role of BPS-Statistics Indonesia as a Statistical Data Coach</i>	Hasil penelitian berdasarkan empat variabel dalam teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa penerapan Satu Data Indonesia belum berjalan dengan baik. Begitu pula dengan peran BPS yang masih belum optimal dalam membina instansi dan pemerintah daerah dalam mengelola data statistik.	Limitasi dalam penelitian ini ialah penelitian ini masih dalam lingkup yang terlalu luas, serta terbatas pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah secara garis besar sama-sama meneliti tentang Implementasi Kebijakan Satu Data

Indonesia. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti ini ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai peran BPS Kabupaten Pesawaran dalam kebijakan SDI. BPS Kabupaten Pesawaran sebagai organisasi vertikal dalam kapasitasnya sebagai pembina data memiliki tugas untuk membina dan memberikan rekomendasi kepada OPD agar data yang dihasilkan dapat sesuai dengan prinsip satu data dan bukan sebagai penyedia data. Sehingga kebaharuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam rangka implementasi kebijakan satu data.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik sudah menjadi hal yang tidak asing di kalangan masyarakat luas seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Telah banyak pendapat beragam yang bersumber dari kalangan ahli mengenai definisi kebijakan publik. Menurut Dye dalam Efrandi (2010) kebijakan publik didefinisikan sebagai “*Whatever governments chooses to do or not to do*”. Artinya kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk memilih kebijakan mana yang akan diterapkan tergantung pada masalah yang muncul atau hasil yang diharapkan dari kebijakan yang dibuat. Sedangkan menurut Anderson dalam Nugroho (2009) Kebijakan adalah rencana yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor untuk menangani masalah atau persoalan yang timbul di masyarakat.

Anderson dalam Tachjan (2006), mengemukakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk : “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan

berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)” (Hoogerwerf, dalam Tachjan, 2006).

Lebih lanjut Friedrich dalam Nugroho (2009) menjelaskan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, sesuai dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Senada dengan hal tersebut, Dye dalam Efrandi (2010) menjelaskan bahwa ada tiga elemen penting yang terdapat dalam sistem kebijakan yakni *stakeholders* kebijakan, pelaku kebijakan (*policy contents*) dan lingkungan kebijakan. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah membuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan orang-orang yang terlibat untuk menyelesaikan masalah di lingkungannya.

Anderson dalam Widodo (2008), mengungkapkan beberapa elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup beberapa hal berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Konsep lain yang menjelaskan kebijakan dalam konteks menyelesaikan masalah dikemukakan oleh Anderson dalam Widodo (2008) yang menyatakan bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai Suatu respons dari sistem politik terhadap tuntutan, permintaan, dan dukungan yang mengalir dari lingkungannya. Menurut David Easton dalam Subarsono dalam Efrandi (2010), "Ketika pemerintah membuat kebijakan publik," kebijakan tersebut berisi nilai-nilai masyarakat yang berlaku yang mempengaruhi kebijakan secara langsung atau tidak langsung. Sehingga kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Maka untuk menghindari penolakan atau resistensi saat dilaksanakan, kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan praktik sosial masyarakat.

Thoha dalam Efrandi (2010) mengidentifikasi dua aspek yang terkandung dalam kebijakan publik. Pertama, proses kebijakan publik tidak berdiri sendiri; itu termasuk dalam dinamika sosial. Kebijakan terkait dengan perubahan masyarakat karena merupakan produk dan tindakan pemerintahan. Hasilnya adalah peningkatan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi masalah publik dan mendorong lahirnya produk kebijakan. Kedua, kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik total bagi ditetapkannya kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada berbagai kelompok DPRD maupun kelompok-kelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tiap-tiap kelompok kepentingan ini memiliki hubungan atau berinteraksi dengan aktor/elit kebijakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan yang akan ditetapkan.

Didasarkan pada beberapa definisi di atas, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan tindakan atau proses yang dilakukan untuk memecahkan masalah publik. Kegiatan-kegiatan ini menggabungkan gagasan dan prinsip-prinsip yang sejalan dengan gagasan dan prinsip-prinsip

masyarakat. Kebijakan publik dibuat melalui tahapan tertentu, dan seorang atau sekumpulan aktor berpartisipasi di setiap tahapannya.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan satu dari banyaknya rangkaian proses kebijakan yang memiliki peranan penting dan menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mengatasi masalah yang hadir di tengah masyarakat. Suatu kebijakan perlu untuk diimplementasikan agar dapat memberikan dampak bagi para sasaran kebijakan dan demi tercapainya tujuan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang telah dibuat dengan seksama sekalipun tidak akan ada artinya jika tidak ditunjang dengan proses implementasi yang baik. Menurut Nugroho dalam Priyanto (2011) menyebutkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan yang telah direncanakan. Implementasi sendiri sering dipandang sebagai suatu perangkat tujuan yang berinteraksi dengan tindakan yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan kebijakan. Di mana dalam proses implementasi kebijakan terdapat aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang diapakai secara bersama dan stimulan (Nurani, 2009).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan implementasi sebagai "pelaksanaan" atau "penerapan". Istilah "implementasi" sering dikaitkan dengan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara singkat mengenai makna dari implementasi yakni *implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan keperluan untuk suatu kegiatan), *to give practical effect to* (memberikan dampak dan akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut bermakna agar suatu hal dapat dilaksanakan, harus ada fasilitas pendukung yang kemudian memberikan dampak atau akibat terhadap hal tersebut (Abd al-Wahhab dalam Priyanto, 2011). Dalam konteks kebijakan, implementasi di atas berarti bahwa kebijakan harus segera dilaksanakan untuk memberi dampak dan mencapai tujuan. Berbeda dengan undang-undang yang

hanya dirumuskan dan kemudian dibiarkan tanpa dilaksanakan atau ditegakkan, kebijakan harus segera dilaksanakan. (Nurani, 2009).

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson dalam Tachjan (2006) mengemukakan bahwa : *“Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem”*. Kemudian Edwards III dalam Tachjan (2006) mengemukakan bahwa : *“Policy implementation, ... is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the consequences of the policy for the people whom it affects”*. Sedangkan Grindle dalam Tachjan (2006) mengemukakan bahwa : *“implementation a general process of administrative action that can be investigated at specific program level”*.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Nuraini (2009), mengatakan : Proses implementasi dapat dipahami sebagai *“those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions”* (tindakan-tindakan individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang secara sengaja diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah dicanangkan dalam suatu kebijakan). Menurut Bambang Sunggono dalam Nurani (2009), implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara-cara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Proses penerapan kebijakan publik tidak dapat dimulai sebelum tujuan kebijakan publik diidentifikasi, rencana dikembangkan, dan dana dialokasikan untuk mencapai suatu tujuan kebijakan.

Dari beragam uraian yang telah disampaikan diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro

menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Jika dipandang dalam artian yang lebih luas, implementasi kebijakan merupakan tahap yang dilakukan segera setelah sebuah undang-undang ditetapkan. Dalam konteks ini, implementasi mengacu pada pelaksanaan undang-undang yang melibatkan berbagai pihak, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan atau program. Namun, implementasi juga dapat dipahami sebagai fenomena kompleks yang terkait dengan proses, keluaran (*output*), dan dampak (*outcome*) (Priyanto, 2018).

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Nurani (2009) implementasi merupakan proses yang teramat penting sebab sebaik apapun suatu kebijakan dibuat jika proses implementasinya tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka tujuan dari penciptaan kebijakan tersebut tidak akan pernah terwujud. Begitu pula sebaiknya sebaik apapun proses implementasi jika kebijakan nya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan dapat tercapai. Oleh karena itu untuk merealisasikan suatu tujuan kebijakan perumusan dan implementasi harus berjalan beriringan dan dipersiapkan dengan sama baiknya.

Teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III berangkat dari dua pertanyaan pokok yakni apa syarat agar suatu implementasi dapat dikatakan berhasil? Dan apa saja yang menjadi penghambat utama dalam suatu implementasi program?. Dari dua pertanyaan itu Edward III menyampaikan empat komponen penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi adalah empat variabel tersebut. Dalam menentukan

keberhasilan atau kegagalan implementasi, semua variabel saling memengaruhi satu sama lain.

2.4 *E-government*

Kebutuhan informasi yang sangat cepat, akurat, dan tepat, membuat penggunaan teknologi saat ini tidak dapat dihindari. Teknologi berbasis web yang menggunakan jaringan internet adalah salah satu yang paling berkembang. Banyak bidang, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan kesehatan, telah menggunakan teknologi ini. Pemerintah juga telah menggunakan teknologi ini, yang sering disebut sebagai *E-Government*. Teknologi ini berkembang saat ini dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat luas. Pemerintah menggunakan teknologi digital ini untuk membangun mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru dikenal sebagai *E-Government*. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju *good government* (World Bank dalam Habibullah, 2010). Sedangkan menurut Kominfo (kominfo.go.id, 2016) *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.

E-Government pun dijelaskan oleh Satria dalam Untari (2018) sebagai upaya untuk menggunakan dan memanfaatkan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan biaya pemerintah, menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat secara lebih baik, meningkatkan akses publik terhadap informasi, dan membuat pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pada intinya dari berbagai definisi yang telah disebutkan dapat

dipahami bahwa *E-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Dalam praktiknya, *E-Government* menggunakan teknologi digital dan jaringan internet untuk menyelesaikan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan publik. Penggunaan teknologi digital oleh lembaga pemerintah tentu bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi publik dalam pengelolaan kebijakan dan penyediaan pelayanan. Ini dilakukan sebagai tanggapan atas perubahan lingkungan strategis yang menuntut administrasi publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu penggunaan *E-Government* dalam tata kelola pemerintahan mendatangkan banyak manfaat. Manfaat *E-Government* menurut Ombudsman (2020) yaitu pertama mengurangi biaya, alasannya karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan partisipasi) pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu.

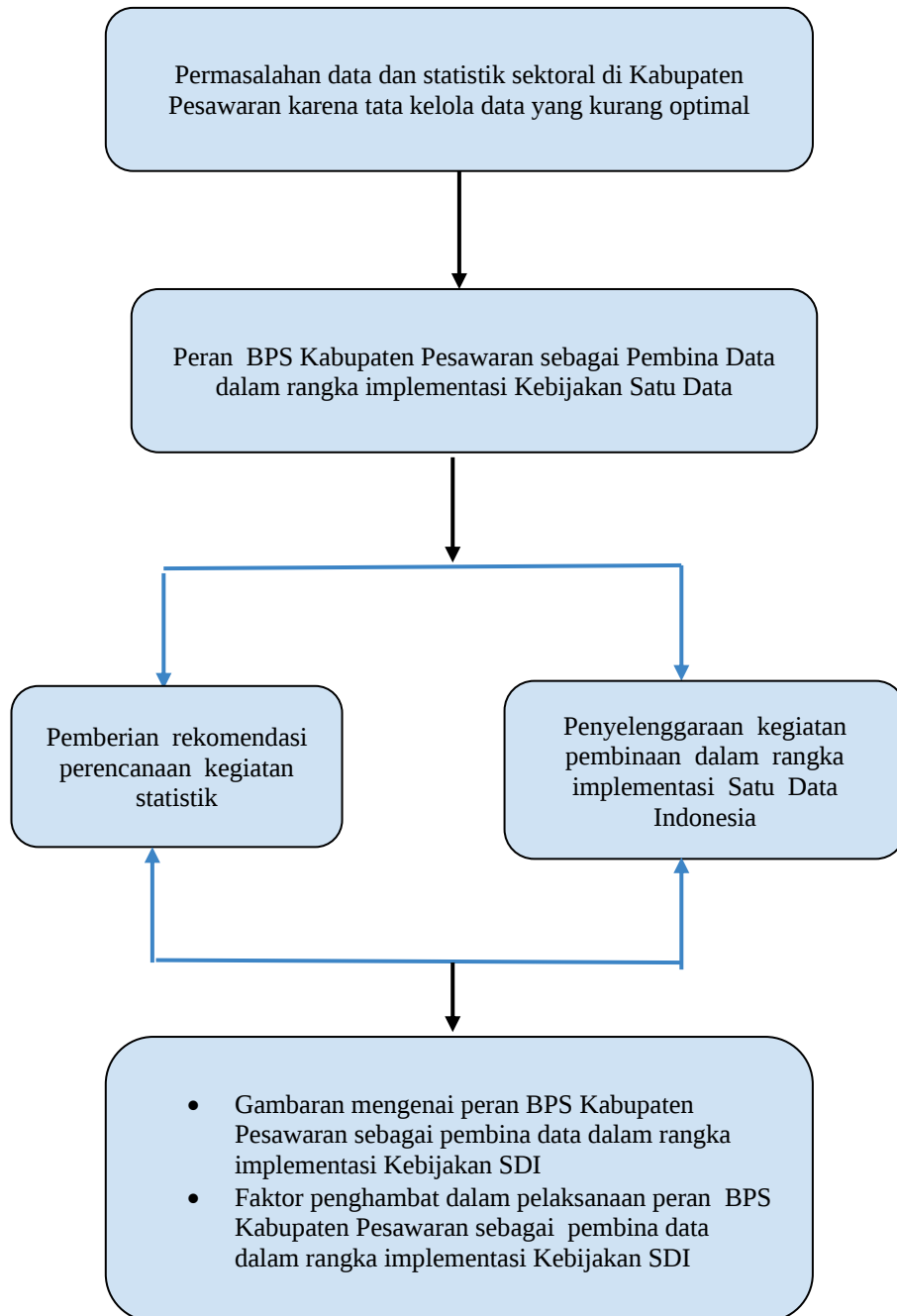
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penerapan *E-Government* adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab (*accountable*) bagi masyarakat karena semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi, pemerintah juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta layanan pemerintah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.5 Kerangka Pemikiran

Data di era digital seperti sekarang menjadi hal yang penting dan makin kini ketersediaannya makin diupayakan oleh berbagai pihak terutama pemerintah dalam rangka pelaksanaan *open government*. Dalam berbagai tahap aksi pembangunan diperlukan keterbukaan informasi, pengelolaan data, partisipasi publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik (Islami, 2021). Berkaitan

dengan hal tersebut volume data yang semakin bertambah seiring berjalannya waktu menghadirkan kekhawatiran adanya inkonsistensi data yang tentunya perlu segera ditangani dan diidentifikasi agar kebijakan yang dibuat akan berpedoman pada data yang benar dan terpercaya. Meski begitu, pada kenyataannya hingga saat ini masalah data di Indonesia masih menjadi semacam pekerjaan rumah yang segera harus diselesaikan.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis implementasi dan peran BPS Kabupaten Pesawaran dalam kebijakan satu data yang disaat bersamaan juga ditunjuk sebagai pembina data statistik pada tingkat kabupaten/kota. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator sesuai dengan tugas-tugas BPS sebagai pembina data yang tercantum dalam Perpres SDI pasal 13 ayat 1. sehingga jika dipaparkan maka kerangka pemikiran yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut :



Diolah oleh peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pesawaran dilaksanakan serta apa faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian kualitatif dihimpun melalui data-data berupa hasil pengamatan, hasil pembicaraan, dan hasil tertulis yang dapat membantu peneliti dalam memberikan analisis dari suatu peristiwa secara terperinci.

Adopsi pendekatan kualitatif pada penelitian ini juga didasarkan pada kecocokan dengan masalah yang diteliti dan fokus penelitian serta data-data pada penelitian yang nantinya akan dipaparkan secara deskriptif guna memaknai hasil penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif juga dipilih karena peneliti ingin menggambarkan berbagai obyek penelitian, memberikan deskripsi, dan menguraikan fenomena masalah. Di samping itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat kembali memperbarui penelitian sesuai dengan temuan-temuan terkini yang ditemukan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran tentang peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai instansi yang ditunjuk sebagai pembina data dalam implementasi kebijakan satu data serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi BPS Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan perannya tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Moeloeng (2006) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, melainkan dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap timbulnya suatu masalah. Penelitian kualitatif membutuhkan penetapan batas penelitian berdasarkan fokus yang muncul sebagai masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian kualitatif berasal dari masalah itu sendiri dan dapat menjadi bahan penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk menganalisis peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data dengan indikator sebagai berikut :

1. Pemberian rekomendasi perencanaan kegiatan statistik
2. Penyelenggaraan pembinaan dalam rangka implementasi Satu Data Indonesia (Pembinaan Statistik Sektoral, EPSS, Pengumpulan dan Pengecekan Metadata).

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting karena akan mempermudah penulis untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih Kabupaten Pesawaran yang berfokus pada BPS Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi penelitian. Sedangkan situs penelitian adalah tempat sebenarnya penelitian mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh objek penelitian. Adapun yang menjadi situs penelitian dalam penelitian ini adalah BPS Kabupaten Pesawaran.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di BPS Kabupaten Pesawaran adalah untuk melihat bagaimana peran BPS kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data serta faktor pendukung dan penghambatnya.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) informan merupakan individu yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dalam fokus penelitian, informan sangat penting dalam penelitian agar peneliti dapat mengumpulkan informasi penting tentang fokus penelitian. Dengan kata lain, untuk memperoleh data yang penting dalam penelitian, diperlukan informan yang memahami dan mempunyai pengertian mendalam mengenai masalah dan fenomena yang sedang diteliti disebut dengan informan kunci. Informan yang dipilih sebagai pemberi informasi kunci haruslah mereka yang mengerti, menguasai, memahami dan terlibat langsung dengan topik penelitian. Informan peneliti dalam melakukan wawancara ini diantaranya :

1. Kepala BPS Kabupaten Pesawaran
2. Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Pesawaran
3. Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Pesawaran
4. Pranata Komputer Muda BPS Kabupaten Pesawaran
5. Fungsional Prencana Madya Bappeda Kabupaten Pesawaran
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Pesawaran

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data utama penelitian sosial berasal dari observasi dan wawancara, yang digunakan untuk menyelidiki kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan demikian tindakan dan kata-kata yang diperoleh dari proses pengamatan dan wawancara adalah sumber utama data peneliti (Koentjaraningrat dalam Darmawan, 2009).

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sebuah data yang telah diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah buku, jurnal,

laporan, artikel, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penerapan kebijakan Satu Data Indonesia.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah sebuah teknik dan tatacara yang dilakukan oleh seorang peneliti guna mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, data-data tersebut dihimpun dengan melakukan kegiatan lapangan yang berguna untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diangkat dalam penelitian (Febriansyah, 2022). adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara pada dasarnya adalah proses percakapan antara dua orang tentang peristiwa, orang, kegiatan, organisasi, perasaan, dan alasan/motivasi mereka. Dalam penelitian ini narasumber wawancara yang peneliti pilih adalah para pegawai BPS yang berkaitan secara langsung dengan implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada individu-individu dan kelompok yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di BPS Kabupaten Peswaran.

b. Observasi

Menurut Bachtiar dalam Darmawan (2009) terdapat dua teknik dalam melakukan observasi yaitu dengan pengamatan terkendali dan pengamatan terlibat. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui pengamatan terlibat. Ini berarti bahwa peneliti harus terlibat secara langsung dalam kegiatan manusia dalam hubungan satu sama lain. Observasi dilakukan guna mengetahui proses implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pesawaran.

c. Dokumentasi

Pencarian data tentang berbagai faktor dan objek, seperti buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, catatan, transkrip, dan lain-lain,

dikenal sebagai metode dokumentasi (Arikunto, 1998). Data yang diperoleh dari dokumentasi merupakan pelengkap dari data hasil observasi dan wawancara. Selain itu menganalisis dokumen organisasi dapat memberikan informasi tentang sejarah tempat yang diteliti. Melalui kegiatan dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan beragam bentuk dokumen termasuk di dalamnya foto dan maupun sumber-sumber dokumen eksternal lainnya di lokasi penelitian agar dapat menjadi pelengkap data penelitian.

3.7 Instrumen Penelitian

Kualitas data tergantung pada instrumen penelitian yang digunakan peneliti selama proses pengumpulan data. Arikunto (2009) menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam proses penelitian. Di antara instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis sendiri

Dalam penelitian ini peneliti mengemban peran sebagai instrumen utama karena peneliti dapat melihat serta mengamati secara langsung peristiwa di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena hal ini, peneliti dapat menetapkan topik penelitian memilih sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan tentang hasil penelitian.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan peneliti sebagai panduan dalam proses wawancara kepada responden atau informan penelitian dan untuk memastikan bahwa pertanyaan yang dibuat tetap berfokus pada objek penelitian. Pedoman wawancara dalam hal ini akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data secara maksimal.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang adalah alat-alat dalam bentuk apapun yang membantu dalam kegiatan penelitian. Contoh perangkat penunjang yang dibutuhkan dalam penelitian meliputi kamera, alat perekam, buku tulis, bolpoin dan lain sebagainya.

3.8 Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2019) dijelaskan sebagai proses mengorganisir, menjabarkan, dan menyimpulkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, dokumentasi, wawancara, gambar, foto, dan lain sebagainya. Analisis data sendiri dilakukan guna menghimpun informasi secara jelas dan eksplisit. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) di dalam analisa data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data, kesimpulan.

1. Kondensasi data

Kondensasi adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari dokumen-dokumen, transkrip wawancara, catatan lapangan tertulis, dan materi empiris lainnya. Peneliti mengkondensasi data dalam penelitian ini dengan meringkasnya. Dengan meringkas data, peneliti dapat menghubungkan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi satu sama lain, sehingga masing-masing data yang diperoleh diperkuat dan membuat analisis data menjadi lebih

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara membuat kutipan (transkrip hasil wawancara, observasi dan pengumpulan dokumentasi).

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, serta alur sebab akibat. Pada tahap ini, penulis membuat kesimpulan sementara dari hasil pengumpulan data.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Setelah data dikumpulkan, hal selanjutnya adalah melakukan pengujian keabsahan data. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa data itu valid karena peneliti harus dapat memverifikasi kebenaran data yang mereka peroleh. Sugiyono (2019) memaparkan bahwa validitas merupakan tingkat keakuratan antara data yang terjadi pada subjek penelitian dan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Maka dapat dipahami bahwa data yang valid adalah data yang sama antara data yang dilaporkan dan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Terdapat empat teknik uji keabsahan data menurut Sugiyono (2019), yaitu sebagai berikut:

a. Uji *Credibility*

Pada penelitian kualitatif, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan diskusi adalah cara lain untuk menguji kredibilitas data. Untuk melakukannya, peneliti kembali ke lapangan guna *double check* atau pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data. Meningkatkan ketekunan dapat dicapai dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, dan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan hasil penelitian.

b. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, "*transferability*" mengacu pada bagaimana temuan penelitian dapat digunakan dalam berbagai situasi atau konteks. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan penjelasan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam laporan mereka. Dengan demikian, pembaca dapat memahami hasil penelitian sehingga mereka dapat memutuskan untuk menggunakannya di tempat lain.

c. Uji *Dependability*

Untuk menguji *dependability*, audit penelitian secara menyeluruh dilakukan. Cara ini digunakan pembimbing untuk memeriksa semua tindakan peneliti selama penelitian berlangsung. Peneliti harus dapat menunjukkan kepada dosen pembimbing bagaimana menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan,

menemukan sumber data, menganalisis data, menguji keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

d. Uji *Confirmability*

Confirmability, atau kepastian data, adalah uji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses. Jika hasil penelitian adalah hasil dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar validitas. Ada kemungkinan untuk melakukan uji kepastian dengan meminta persetujuan dari sejumlah orang, termasuk dosen pembimbing, tentang pendapat mereka tentang fokus penelitian, serta data yang diperlukan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dideskripsikan oleh peneliti pada bab sebelumnya tentang peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Satu Data Indonesia, diperoleh kesimpulan yakni:

1. BPS Kabupaten Pesawaran telah melakukan tindakan pengumpulan pengajuan rekomendasi melalui aplikasi bernama Romantik (Rekomendasi Kegiatan Statistik) untuk memudahkan pengajuan bagi para OPD dengan cara pengisian secara online. Pengisian Romantik dilakukan dengan melengkapi dokumen FS3 (Formulir Pemberitahuan Survey Statistik Sektoral) untuk kemudian dicek dan dievaluasi oleh BPS Kabupaten Pesawaran dalam kapasitasnya sebagai pembina data. Sedangkan dalam aspek penyelenggaraan pembinaan lain yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Pesawaran adalah Pembinaan Statistik Sektoral sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara produsen data dengan pembina data. BPS Kabupaten Pesawaran melakukan pertemuan masif dengan mengundang setiap OPD sekali dalam setahun. Selain itu BPS Kabupaten Pesawaran juga membuka sesi konsultasi terhadap setiap OPD yang hendak menanyakan sesuatu terkait kegiatan statistik sektoralnya. Dalam aspek ini masih ditemukan hambatan seperti forum satu data yang belum berjalan, kurangnya jumlah pertemuan, ritme kerja yang berbeda antara BPS dan OPD serta pola rotasi-mutasi pegawai OPD yang cenderung cepat. Pada kegiatan

pembinaan lain melalui EPSS yang merupakan langkah penilaian penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. BPS Kabupaten Pesawaran melaksanakan dua peran dalam kegiatan EPSS yang mana sebagai Tim Penilai Badan dan juga sebagai pembina. Dalam tugasnya sebagai Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Pesawaran melakukan penilaian dokumen dan interview terhadap penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim penilaian Internal. Sedangkan sebagai pembina BPS bertugas untuk memberikan arahan dan persiapan terkait kegiatan EPSS yang akan digelar setiap tahunnya melalui kegiatan rapat koordinasi baik internal maupun eksternal. Pada aspek ini ditemukan bahwa penilaian yang tidak merata kepada seluruh instansi dan hanya dibebankan pada Diskominfo Kabupaten Pesawaran menjadi kelemahan dalam program ini. Dalam aspek pengumpulan dan pengecekan metadata ditemukan bahwa BPS Kabupaten Pesawaran sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya hanya saja terdapat bias dalam pelaksanaan tugas karena BPS Kabupaten Pesawaran masih harus menghandel tugas Diskominfo Kabupaten Pesawaran dalam hal mengumpulkan metadata.

2. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data ialah masih minimnya pengetahuan OPD sebagai objek pembinaan BPS Kabupaten Pesawaran tentang hal statistik dan ketidaksadaran OPD tentang kegiatan statistik yang sedang mereka lakukan. Selain itu, pergantian pegawai yang cepat di dalam lingkup kerja OPD turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan karena orang-orang yang sudah dibina di tahun sebelumnya sudah akan berganti di tahun berikutnya sehingga sulit bagi BPS Kabupaten Pesawaran untuk melakukan *follow up* dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan. Pembebanan nilai IPS yang tidak merata juga menyebabkan reduksi tanggung jawab dari pihak OPD untuk

meningkatkan kualitas data sektoralnya. Terakhir, birokrasi yang terfragmentasi menyebabkan beberapa pembagian tugas antara BPS Kabupaten Pesawaran dan Diskominfo Kabupaten Pesawaran dalam implementasinya menjadi bias.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti bermaksud akan memberikan saran dalam berjalannya peran BPS Kabupaten Pesawaran dan perbaikan tata kelola data di BPS Kabupaten Pesawaran mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya kesadaran dari setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Kebijakan Satu Data untuk terus *mengupgrade* pengetahuannya tentang pentingnya penerapan prinsip SDI dalam berbagai kegiatan statistik sektoral agar setiap proses tata kelola data yang berjalan menjadi lebih baik dan dapat menghasilkan *output* data yang berkualitas.
2. Diharapkan agar Forum Satu Data tingkat Kabupaten Pesawaran bisa berjalan secepatnya agar proses koordinasi antar instansi dapat melibatkan berbagai pihak di suatu forum yang memang dipperuntukkan untuk wadah koordinasi penyelenggaraan SDI di daerah.
3. Diharapkan agar ada mekanisme pembebanan nilai IPS yang lebih merata kepada setiap OPD agar tanggung jawab keberlangsungan Kebijakan SDI di daerah tidak hanya menjadi beban bagi BPS Kabupaten Pesawaran dan Diskominfo Kabupaten Pesawaran sebagai pembina dan walidata.
4. Diharapkan agar terciptanya kegiatan pembinaan yang efektif dan efisien, OPD bisa mengirimkan orang-orang yang tetap setiap tahunnya untuk mengikuti kegiatan pembinaan agar kegiatan pembinaan yang dilakukan tidak terus mengulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2014). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT BUMI AKSARA.
- Amelia&Rahayu. (2023). ANALYSIS OF SATU DATA INDONESIA POLICY IMPLEMENTATION: THE ROLE OF BPS-STATISTICS INDONESIA AS A STATISTICAL DATA COACH. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 708-719. doi:<http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3115>
- Azantaro. (2009). Analisis Pengendalian Kualitas Data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. . Skripsi. Universitas Medan Area : Medan.
- Darmawan, A. (n.d.). Peran Ruang Publik Dalam Mendukung Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Atas Pro dan Kontra Keistimewaan DIY Dalam Krisis Regulasi Keistimewaan DIY 1998-2009) . *skripsi. Universitas Indonesia*.
- Diskominfo Kota Semarang. (2022). Panduan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik. Retrieved from <https://pustakadata.semarangkota.go.id/public/upload/pdf/446-panduan-pengajuan-rekomendasi-kegiatan-statistik.pdf>
- Efrandi, T. (2010). EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KABUPATEN MUARA ENIM (Studi Kasus di Kecamatan Lawang Kidul) . Jakarta : Skripsi. Universitas Indonesia.
- FEBRIANSYAH, M. F. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATUDATA DALAM MENYEDIAKAN BASIS DATA YANG AKURAT DAN TRANSPARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN*. Palembang: skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Habibullah, A. (2010). Kajian pemanfaatan dan pengembangan e-government. *Jurnal Unair*, 23(3).
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 10(1), 13-23. doi:10.31504/komunika.v9i1.3750
- Katan, E. (2022). Jalan Panjang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. *Journal Of Government and Social Issues (JGSI)*, 2(10).

- Laiya, J. W., & Manueke, S. (2022). PENTINGNYA AKURASI DATA DALAM MEMPERTAHANKAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA. *Jurnal MABP*, 4(2), 38-51.
- Lexy, M. (2005). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Liana, I., & Mubaraq, A. (2023). Strategi Perbaikan Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (Studi pada Pelayanan Statistik Terpadu). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM*, 1, 121-131.
- Maulidia, F. M. (2017). PENGARUH STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR) (Studi di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul). *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MEDIA HUSADA*, 6(2), 183-191.
- Maulidya, R. (2022). ANALISIS RETROSPEKTIF KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273-287.
- Musnanda. (2021). Perencanaan Pembangunan berbasis Data dan Informasi. Retrieved from <https://musnanda.com/2021/12/18/perencanaan-pembangunan-berbasis-data-dan-informasi/>
- Nafi'ah, B. A. (2021). DATA GOVERNANCE MECHANISMS IN INDONESIA'S COVID-19. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 23(3), 339-345.
- Nirmala, A. N., & Damayanti, U. R. (2016). Analisis Kualitas Data dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen dengan Metode Importance Performance Analysis dan Customer Satisfaction Index (Studi pad BPS Provinsi Riau). Retrieved from <https://repository.uin-suska.ac.id/12085/1/ANALISIS%20KUALITAS%20DATA%20DAN%20KUALITAS%20PELAYANAN%20TERHADAP%20KEPUASAN%20KONSUMEN%20DENGAN%20METODE%20IMPORTANCE%20PERFORMANCE%20ANALYSIS%20DAN%20CUSTOMER%20SATISFACTION%20INDEX.pdf>
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurani, D. (2009). *Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan*. Tesis. Universitas Indonesia : Jakarta.
- OGI News. (2018). Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka. Retrieved from <https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/licnnCihthfGkp8SSOQTdRdlo8jZReMOg5bXuEo2o.pdf>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran. (2020). Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- Pradana, G. A. (2016). Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(3), 79-87.
- Prasetya, W. S. (2022). TANTANGAN IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS KABUPATEN CIAMIS). Retrieved from http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/1203/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20Program%20Studi%20Ilmu%20Pemerintahan_Ebook-18-25.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- PRIYANTO, H. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU* . skripsi. Universitas Brawijaya : Malang
- Purba, A. P., Nurrachman, A., & Adhyaksa, R. P. (2021). “MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA 2.0 MELALUI PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SECARA KOLABORATIF DALAM RANGKA MENGHADAPI GLOBAL MEGATRENDS 2030”. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/353369210_MEWUJUDKAN_SATU_DATA_INDONESIA_20_MELALUI_PENGUATAN_TATA_KELOLA_PEMERINTAHAN_SECARA_KOLABORATIF_DALAM_RANGKA_MENGHADAPI_GLOBAL_MEGATRENDS_2030
- Putri, R. A. (2022). DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK MASA KINI MELALUI ESKALASI KUALITAS SATU DATA INDONESIA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh* , 23-34.
- Rahman, K. (2018). Pelayanan Pemerintahan yang Bertanggung jawab. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 34.
- Rianto, Shofa, R. N., & Yusuf, E. (2020). IMPLEMENTASI KUALITAS DATA DALAM PERAN TATA KELOLA DATA DENGAN PENDEKATAN FRAMEWORK DAMA. *Jurnal Siliwangi*, 6(2), 44-52.
- Ritonga, R., Saepudin, A., & Wahyudin, U. (2019). PENERAPAN MODEL EVALUASI KIRKPATRICK EMPAT LEVEL DALAM MENGEVALUASI PROGRAM DIKLAT DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 12-21.
- Riwukore, J. R., et al (2021). Implementation of One Indonesian Data by the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Studi*

- Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)*, 1(2), 117-128.
doi:<https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.1194>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryahadi, M. F. (2023). Satu data Indonesia (one Indonesian data) to actualize public information disclosure and efficacious process management in the Mojokerto city government. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(7), 3145-3151. Retrieved from <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Susniwati, & Zamili, M. (2022). Acceleration of One Indonesian Data through Collaborative Governance in Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 11(2), 166-177. doi:<http://dx.doi.org/10.31314/pjia.11.2.166-177.2022>
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/96/VI.01/HK/2020 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Untari, F. (2018). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEMPAJAK ONLINE (E-TAX) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Malang : Skripsi. Universitas Brawijaya
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.
- Yovita. (2016). Implementasi Penerapan E-Government. Retrieved from https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/8554/implementasi-penerapan-e-government/0/sorotan_media
- Yuanita., dkk. (2022). Evaluasi Model CIPP Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini di Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3427-3440.